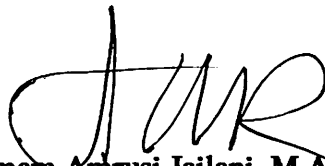


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Hariri (NIM C03205021)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Januari 2010

Pembimbing



Dr. Imama Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Hariri (C03205021)** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 10 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

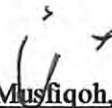
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



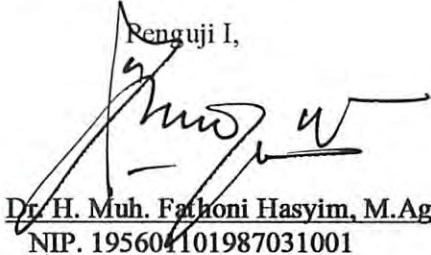
Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Sekretaris,



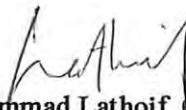
Siti Musfiqoh, MEI.
NIP. 197608132006042002

Penguji I,



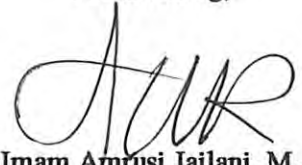
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195604101987031001

Penguji II,



Muhammad Lathoif Ghozali, MA.
NIP. 197511032005011005

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Surabaya, 15 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. M. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan menghasilkan pembahasan yang sistematis maka penulis perlu untuk menguraikan sistematika penulisan dalam lima bab, sebagai berikut:

Pada bab pertama: merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global tentang pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab kedua: pembahasannya difokuskan pada masalah landasan teori-teori tentang pidana, yang mengacu pada hukum pidana Islam dan hukum positif serta, tentang jenis-jenis pidana pembunuhan, dari pidana itu nantinya akan timbul sanksi-sanksi pidananya, dasar hukum pelaksanaannya, serta sifat dan tujuan bentuk pidana itu sendiri dan manfaat dari pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Pada bab ketiga: membahas tentang penguraian data-data, yang di ambil pada kepres tentang remisi yang mencakup kapan pelaksanaan remisi, bentuk-bentuk remisi, dan syarat-syarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang berhak mendapatkan remisi.

Pada bab keempat: analisis merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini dikemukakan tentang analisa hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi bagi kasus

Qisās juga dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga, karena adanya wali korban yang menjadi pewaris hak *qisās*, seperti pembunuh yang meninggal dunia terus peng*qisās*annya digantikan oleh ahli waris seperti anaknya.

e. Pidana penjara dalam hukum pidana Islam

Pidana penjara dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* sendiri merupakan hukuman yang di jatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang di tentukan oleh syariat Islam, yaitu hukuman *hudūd*, *qisās* dan *diyat*.³⁵ Sedangkan hukum *qisās* dan *diyat* merupakan hukum yang ada nashnya seperti: hukuman bagi pezina, pencuri, dan pembunuh.

Hukuman kawalan sebagai suatu alternatif dari hukuman *ta'zir* ini terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Hukuman kawalan dalam waktu terbatas.

Hukuman kawalan waktu terbatas adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama' berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan, di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 299

hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
- 5) Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 7) Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
- 11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya

sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menetapkan, bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti masa media lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu

matinya orang lain. Kemungkinan lain jika perbuatan pidana pembunuhan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja akan dianggap sebagai penganiayaan berat yang menimbulkan matinya orang lain.

Menurut R.Sursilo yang dimaksud dengan perbuatan pidana pembunuhan adalah “perbuatan yang mengakibatkan orang lain”. Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan.

Dari keterangan yang disebutkan di atas bahwasannya pembunuhan yang mencakup pidana sementara adalah pembunuhan yang sudah dijelaskan di KUHP mulai pasal 338 sampai pasal 349, akan tetapi mengecualikan pasal 339 dan 340 karena pidana di situ sifatnya bukan sementara melainkan bersifat pidana seumur hidup, bahkan bisa juga terkena hukuman pidana mati dengan alasan pembunuhannya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan pidana yang bersifat sementara antara lain adalah:

1. Pembunuhan pasal 338 .
2. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
3. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
4. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan

orang lain sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu kemanfaatan dari perbuatan itu. Semisal, ketika menentukan putusan hukuman terhadap orang yang bersalah, kita harus memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk merubah segala perbuatan mereka yang meresahkan masyarakat, seperti dorongan untuk meninggalkan perbuatannya atau kalau toh mereka terkena hukuman pidana, maka bagi penegak hukum harus memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti misalnya lembaga pemasyarakatan yang telah menaungi para narapidana untuk merubah kehidupannya agar setelah mereka keluar dari lembaga tersebut mereka dapat diterima oleh masyarakat, meskipun orang itu pernah melakukan perbuatan pidana.

B. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana pembunuhan.

Sanksi pidana dilahirkan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya tujuan dari hukum tersebut yaitu kemaslahatan yang menyeluruh bagi masyarakat. Pidana atau sanksi baik di hukum positif dan hukum Islam diterapkan meskipun dalam prakteknya tidak disenangi oleh yang tertimpa pidana tersebut. Melihat kondisi seperti ini maka pidana tersebut harus mempunyai nilai yang baik dan ideal antara lain:

1. Harus mampu mencegah seseorang melakukan maksiat atau mempunyai fungsi preventif dan mampu menjerakan setelah perbuatan.
2. Memberikan hukuman kepada seseorang bukan berarti membalas dendam

Disamping itu, ada satu ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik berkata bahwa setiap ada perkara *qisās* yang dilaporkan kepada Rasulullah beliau selalu memerintahkan orang-orang yang akan melakukan *qisās* tersebut untuk memaafkan.

Dan dalam surat *asy-Syūrā* ayat 40 juga menjelaskan. Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Maka barang siapa memaafkan, yakni sedikitpun tidak menuntut haknya, atau mengurangi tuntutananya sehingga tidak terjadi pembalasan yang serupa itu, lalu menjalin hubungan yang harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang pernah menganiayanya secara pribadi, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang selalu berbuat *kezaliman* dimuka bumi.

Dalam keterangan pada ayat diatas sebagai anjuran untuk kita agar selalu memaafkan dan berbuat baik itu, tujuannya adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya, karena perbuatan yang sedemikian itu sangat dibenci oleh Allah.

Sebenarnya kalau kita sadar pemaafan tersebut akan lebih menyentuh psikologis kepada pelaku kejahatan dari pada penjatuhan sanksi. Dengan pemaafan tersebut pelaku akan berpikir betapa mulianya kasih Allah yang memberikan melalui si korban atas keluarganya, meskipun akan melihat betapa agungnya perbuatan tersebut.

